Vol. 1 No. 3, November 2008

POPULIKA

JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Mekanisme Survival Strategi Nelayan Tradisional di Desa Kluwut, Bulakamba Kabupaten Brebes
Nurul Rofikoh

Strategi CSR Bank Indonesia dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Wisata Korban Gempa Bumi Manding Kabupaten Bantul
Oktiva Anggraini

Kapitalisasi Dunia Pendidikan
(Studi Kasus Semakin Banyaknya Program Studi yang Ditutup pada Perguruan Tinggi di Yogyakarta)
Puji Qomariyah

Dampak Kawin Kontrak Terhadap Peran dan Kedudukan Wanita di Lingkungan Industri Kerajinan Ukir
Studi kasus di Tahunan Jepara Jawa Tengah
Retno Kusumawiranti

Aksesibilitas Masyarakat Nelayan Terhadap Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
Studi kasus di masyarakat pesisir pantai Trisik Kabupaten Kulonprogo
Suwarjo

Peran dan Kedudukan Wanita Perguruan Tinggi Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta
Syakdiah

ISSN : 0216-2490

DAFTAR ISI

POPULIKA

JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

VOL 1, NO. 3 , November 2008

Nurul Rofikoh	*3 - 21*	Mekanisme Survival Strategi Tradisional di desa Kluwut, Bulakamba Kabupaten Brebes
Oktiva Anggraini	*22 - 37*	Strategi CSR Bank Indonesia dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Wisata Korban Gempa Bumi Manding Kabupaten Bantul
Puji Qomariyah	*38 - 60*	Kapitalisasi Dunia Pendidikan (Studi Kasus Semakin Banyaknya Program Studi yang Ditutup pada Perguruan Tinggi di Yogyakarta)
Retno Kusumawiranti	*61 - 72*	Dampak Kawin Kontrak Terhadap Peran dan Kedudukan Wanita di Lingkungan Industri Kerajinan Ukir (Studi Kasus di Tahunan Jepara Jawa Tengah)
Suwarjo	*73 - 90*	Aksesibilitas Masyarakat Nelayan Terhadap Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) (Studi kasus di Masyarakat Pesisir Pantai Trisik Kabupaten Kuln Progo)
Syakdiah	*91 - 106*	Peran dan Kedudukan Wanita Perguruan Tinggi Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta

JURNAL POPULIKA adalah jurnal enam bulanan diterbitkan oleh Fisip UWMY sebagai media informasi dan forum pembahasan problema sosial dan politik muthakhir di tanah air. Berisi tulisan ilmiah dari hasil penelitian, pendampingan, atau gagasan orisinil yang segar, kritis, dan transformatif. Redaksi mengajak para ahli, praktisi, aktivis dan masyarakat luas untuk berpartisipasi mengirimkan karyanya. Redaksi dapat memperbaiki tulisan tanpa merubah substansi. Tulisan diketik dengan huruf Times New Roman, 12 Point, spasi ganda, maksimal 20 halaman kwarto. Tulisan dikirimkan via email atau dalam bentuk file-disk via pos atau langsung ke alamat redaksi dengan melampirkan 'Curiculum Vitae.

PENANGGUNG JAWAB : DEKAN FISIP UWMY; PEMIMPIN REDAKSI : OKTIVA ANGGRAINI SIP, MSi. ANGGOTA REDAKSI : PUJI QOMARIYAH, S.Sos.MSi DEWAN PENYUNTING : Drs. YANA KARYANA, MSi, Drs. DJAYA HENDRA, MSi.

Strategi CSR Bank Indonesia dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Wisata Korban Gempa Bumi-Manding Kabupaten Bantul

Oktiva Anggraini [1]

ABSTRACT

Community Sosial Responsibility (CSR) Program's Bank Indonesia namely Desa Kita Program was usefull enough in women empowering in Manding village, Bantul Regency. By using integratif strategy, it involved opinion leaders, beraucracy & local community to improve women's entrepeneurship and facilitating their activities. This paper describes about the various steps and strategy of Bank Indoenesia in implementing CSR. Most of the steps of Desa Kita Program was designed by Bank Indonesia. It depended on Bank Indonesia's bugdgeting, too. Finally, it had less participation of local community, especially in environment and sanitation's program. This research concluded, the various steps influenced by the human resources abilities and the coordination of stakeholder and local community.

Key words: CSR, women empowering.

Pendahuluan

Sebagai tindak tanggap darurat terhadap peristiwa gempa bumi yang melanda DIY dan Jawa Tengah 27 Mei 2006, program *recovery* dilakukan oleh pemerintah bergandeng tangan dengan pihak swasta, LSM maupun para dermawan yang sifatnya perorangan. Banjirnya bantuan gempa yang datang, ibarat sebagai 'gempa' berikutnya bagi masyarakat korban gempa maupun masyarakat Yogyakarta. Di bidang ekonomi, khususnya sektor usaha kecil menengah (UKM) berbagai langkah telah ditempuh perbankan seperti pemberian masa tenggang, pembayaran angsuran, keringanan bunga, penjadwalan kembali utang atau penyuntikan pinjaman baru, juga membuahkan hasil. Menurut data Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul (2006), lebih dari 80 persen sektor usaha kecil menengah (UKM) di Bantul rusak akibat gempa. Nilai kerugian mencapai lebih dari 20 miliar rupiah sedangkan kebutuhan akan restrukturisasi mencapai 30 miliar rupiah. Sebanyak 97% nasabah mikro yang menjadi korban gempa, setelah setahun, mulai masuk kategori lancar setelah direstrukturisasi. Artinya, kemampuan mengangsur dari warga gempa bumi sudah pulih. Untuk pengucuran kredit baru pun bank sudah merasa yakin dengan itikad baik dan kemampuan nasabah mengangsur.

Untuk mempercepat proses restrukturisasi kredit, beberapa bank, seperti Bank BRI dan BPR Bhakti Daya Ekonomi bahkan memberikan pinjaman sampai 5 juta rupiah tanpa jaminan. Nilai retrukturisasi kredit itu mencapai 270 miliar rupiah bagi 290.000 debitor di DIY dan Jateng. Jumlah tersebut hanya sebagian yang tercatat oleh media (*Kompas*, 23 Mei, 2007). Masih banyak sederet bantuan

[1] Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UWMY

ISSN : 0216-2490

dalam berbagai bentuk yang sifatnya jangka pendek,menengah dan panjang sebagai bagian proses *recovery* gempa bumi dari lembaga-lembaga internasional seperti WHO, UNICEF, IOM, UNFPA, UNIDO, UNCC, UNDP, AUSAID, WORLD BANK, UNIDO, IRD, MUSLIM AID, JRS, GTZ, JICA, FAO, dll. Sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)*, peristiwa gempa tersebut juga menarik perhatian dari banyak perusahaan swasta, BUMN untuk mengulurkan bantuan kepada para korban dan pemulihan wilayah akibat gempa bumi. Setahun setelah bencana gempa bumi terjadi, berdasarkan data Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY hingga Mei 2007 sekitar 87,72 persen dari 160.109 rumah rusak berat atau roboh akibat gempa telah terbangun kembali. Lebih dari 75 persen berada di kabupaten Bantul. Akan tetapi pemulihan UKM baru berkisar 60-70 persen. Permasalahan yang masih dijumpai adalah kurangnya pemberian bantuan modal, tenaga kerja, alat produksi dan pemasaran (*Wawancara dengan Kepala Disperindagkop Bantul, Yahya, Yogyakarta, 24 Mei 2007).*

Berangkat dari kenyataan di atas, pemulihan UKM mendesak dilakukan karena andilnya besar dalam perekonomian wilayah. Hingga 2005 sumbangan sektor industri, terutama skala kecil mendekati 15 persen terhadap total pertumbuhan DIY. UKM juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Tahun 2006 tercatat 600 unit usaha yang dibina Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi DIY mampu menyerap tenaga kerja hingga 3000 orang atau lima kali lipatnya. Tabel 1 menunjukkan pemulihan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Di dalam penyaluran bantuan tersebut, sebagaimana yang sering dilansir media massa tak luput dari persoalan-persoalan. Bantuan pembangunan yang dilaksanakan secara tidak hati-hati dan tidak terorganisasi, justru lebih memperburuk kondisi sosial dan menjadi beban ekonomi dan psikologi masyarakat di lokasi bencana. Beberapa dampak negatif yang perlu diantisipasi antara lain adalah munculnya konflik horizontal antar masyarakat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat/ adil misalnya pemberian bantuan yang berbeda, perebutan aset, pertentangan kepentingan dan lain-lain. Kondisi lain yang terjadi adalah adanya pihak-pihak tertentu yang akan memanfaaatkan situasi galau ini dengan manipulasi tanah, percaloan, intimidasi dan sebagainya dengan mengatasnamakan masyarakat korban bencana

Sistem kelompok masyarakat yang menjadi ujung tombak proses pembangunan kembali rumah penduduk dan kepedulian sosial warga membantu percepatan rekonstruksi rumah mencapai 81 persen. Modal sosial inilah yang pada gilirannya

digalang oleh Bank Indonesia cabang Yogyakarta, sebagai instansi yang menerapkan program CSR di Desa Wisata Manding kabupaten Bantul Yogyakarta. Pelaksanaan Bank Indonesia *social responsibility strategis filantropis* sebelumnya telah mendapatkan persetujuan prinsip Gubernur Bank Indonesia tahun 2006, yang dikenal dengan program Desa Kita. Pendekatan yang digunakannya melalui *difussion of innovation*, bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Dari 3 wilayah *pilot project* Bank Indonesia dalam program Desa Kita di Indonesia, satu di antaranya adalah desa Manding Bantul. Potensi desa Wisata ini menanti uluran tangan pemerintah maupun swasta untuk menata ulang kawasan yang luluh lantak akibat gempa. Persoalannya menjadi menarik, mengingat 70 persen pengrajin desa wisata Manding adalah perempuan. Dengan kata lain, program ini berupaya meningkatkan pemberdayaan perempuan yang saat ini telah berkembang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka menarik untuk dikaji dalam penelitian ini tentang strategi CSR Bank Indonesia dalam pemberdayaan perempuan di desa wisata korban gempa bumi-Manding kabupaten Bantul.

Teknik pengumpulan data primer dalam riset ini dilakukan dengan dua cara yakni melalui wawancara mendalam *(indepth interview)* dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan secara *purposive* dengan para informan, yaitu orang-orang yang dianggap paling mengetahui permasalahan dan secara *snowball* yakni melalui informasi yang diberikan oleh informan yang sudah diwawancarai sebelumnya. Observasi dilaksanakan untuk melihat kondisi lingkungan daerah penelitian dan

Tabel 1.
Pemulihan Industri Kecil di DIY

No.	Bidang Industri	Wilayah	Unit Usaha	Nilai (rupiah)	Sumber dana
1.	Makanan	Kulon Progo dan Bantul	139	847.000.000	APBN
2.	Kerajinan & Umum	Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Kota Yogyakarta	774	22.420.825.310	APBN
			679	6.714.685.000	APBN
3.	Sandang Kulit	Semua kabupaten	70	2.030.925.450	APBN
			56		
4.	Logam dan Elektronika	Kota Yogyakarta	75	2.029.590.200	APBN
			202	1.666.560.000	APBN

Sumber : Disperindagkop DIY, 2006

aktivitas wanita pengrajin desa Manding Bantul. Sebagai pelengkap data primer, pengumpulan data sekunder juga dilakukan di instansi-instansi seperti Bank Indonesia Wilayah Yogyakarta, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Bantul, Bapeda Bantul, Kelurahan desa Manding, dokumen yang berujud buku, jurnal, surat kabar, gambar dan sebagainya

Kerangka Teori

Tanggung jawab sosial pelaku usaha/perusahaan dalam pemahaman yang sederhana digambarkan oleh Keith Davis (1980, 48) sebagai suatu pengetahuan mengatur memanaj komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat baik pada lingkungan eksternal (*secondary stakeholder*) yaitu komunitas lokal, kelompok masyarakat, maupun terhadap lingkungan internal khususnya kepada karyawan yang akan berpengaruh terhadap perusahaan. Perusahaan mencoba menjalin komunikasi untuk mendapatkan nilai manfaat yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan lingkungannya melalui pemberian respon yang positif dengan memahami kebutuhan dan harapannya dengan senantiasa memegang prinsip-prinsip etik.

Definisi tanggung jawab sosial menurut *World Business Council on Sustainable Development* (Warta Pertamina, 2004) adalah komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan berkonstribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Dalam penerapannya, dikenal serangkaian strategi tanggung jawab sosial (Siti Zuhroh, 2006):

1. Strategi Adaptif.

Penerapan tanggung jawab sosial dengan strategi adaptif artinya perusahaan baru merespon atau melakukan tanggung jawab sosialnya jika suatu peristiwa sudah terjadi atau mendapat tekanan dari masyarakat.

2. Strategi Pro aktif.

Strategi ini dilakukan jika jika pimpinan perusahaan melakukan langkah terhadap perubahan lingkungan dengan upaya mendekati "penguasa" sebagai pihak yang dianggap mempunyai kekuasaan dalam menciptakan suatu kondisi lingkungan tertentu melalui peraturan yang dibuat untuk menjaga kepentingan perusahaan.

3. Strategi Interaktif.

Strategi Interaktif menggambarkan kondisi perusahaan yang senantiasa melakukan antisipasi dan mengkaitkan tujuan perusahaan dengan kepentingan publik (Keith Davis, 1980: 50). Dengan menerapkan strategi interaktif berarti filosofi bisnis yang dimiliki sejak awal adalah bahwa perusahaan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sekitar, begitu juga sebaliknya

masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan. Kondisi ini tentu akan menciptakan keharmonisan dan keselarasan antara perusahaan dan masyarakat sekitar, agar saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Dengan strategi ini, tanggung jawab sosial tidak hanya sekedar "aksesoris" yang hanya memberikan santunan uang dan barang pada saat-saat tertentu.

Kegiatan CSR mengalami perubahan paradigma. Bila pada masa sebelumnya lebih pada pendekatan *adhoc, charity* serta *externally driven* maka sekarang lebih pada *internally driven* dengan menekankan *patnership*. Masalahnya yang sering dihadapi adalah sasaran tidak tepat dan tidak efektif. Sementara perusahaan itu telah melakukan program CSR dengan lebih maju, dengan biaya yang besar. Hal ini ditemui karena umumnya perusahaan kurang terlatih melakukan *community development*. CSR sudah banyak dipandang sebagai suatu keharusan di dalam berbisnis. Korporasi makin menyadari CSR pada gilirannya berdampak positif bagi bisnis itu sendiri. Mereka bisa membangun hubungan dengan masyarakat secara lebih intens. Hubungan kuat ini akan menjadi benteng sosial bagi perusahaan. Masing-masing perusahaan tentunya mempunyai tingkat berbeda-beda dalam melakukan interaksi dengan lingkungan. Interaksi dengan masyarakat itu tidak mungkin diabaikan. Di sinilah SR dapat dipandang sebagai pengejawantahan *corporate ethics* terhadap lingkungan bisnis terutama aspek masyarakat sekitarnya.

Jakarta Consulting Group mengembangkan konsep *Community Development Cycle* atau lebih tepatnya ditekankan dengan pengembangan komunitas. Langkah pertama adalah *community net analysis* untuk menemukan kebutuhan dan keinginan masing-masing kelompok. Selanjutnya menimbulkan rasa *ownership* antara masyarakat dan korporasi. Dengan bekal ini maka program pengembangan menjadi berdaya guna terutama bila pemanfaatan atau utilisasi proyek juga melibatkan masyarakat sasaran. Setelah itu dapat dilakukan sosialisasi ulang agar lebih meningkatkan kebanggaan mereka, reevaluasi atau melakukan audit proyek pembangunan guna menyusun perbaikan dan *strategic planning* berkaitan dengan masalah lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, masyarakat sekitar hingga peningkatan servis yang hendak dilakukan (AB. Susanto, 2003)

Lepas dari rangkaian tahapan yang cukup panjang itu, yang lebih penting adalah profesionalisme tenaga SDM dalam menganalisa sosial, lingkungan dan sebagainya serta pemahaman *community development*. Selain itu, program CSR sangat rentan dengan bahaya intervensi politik. Oleh karena itu, penyelenggara CSR dituntut dapat meredam *flavour* politik sebab apabila *flavour* itu makin meningkat dan potensial maka akan merusak profesionalisme dan selanjutnya

program *mudah* disalahgunakan. Lebih dari itu, perlu adanya kontrak sosial yang jelas dengan masyarakat (AB. Susanto, 2003).

Bila program CSR ini dikaitkan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, terdapat benang merah. CSR yang baik titik tekan keberhasilannya datang dari diri dan untuk diri sendiri dan lingkungannya. Di samping itu pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar secara lokal dan nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif (Pranarka, 1996).

Sebagaimana dipaparkan Tjokrowinoto (2004) *empowering* memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) prakarsa desa, 2) dimulai dengan pemecahan masalah, 3) proses disain program dan teknologi bersifat asli/alamiah, 4) sumber utama adalah rakyat dan sumber daya lokal, 5) kesalahan dapat diterima, 6) organisasi pendukung dibina dari bawah, 7) pertumbuhan organik bersifat tahap demi tahap, 8) pembinaan personil berkesinambungan, berdasarkan pengalaman belajar dari kegiatan lapangan, 9) diorganisir oleh tim interdisipliner, 10) evaluasi dilakukan sendiri, berkesinambungan dan berorientasi pada proses, 11) kepemimpinan bersifat kuat, 12) analisis sosial untuk definisi masalah dan program dan 13) fokus manajemen pada kelangsungan dan berfungsinya sistem kelembagaan.

Meski tidak disebut secara tersirat arti pemberdayaan bagi perempuan, setiap langkah pemberdayaan menyentuh perempuan. Ratna Saptari (1997) menambahkan bahwa dalam konsep pemberdayaan terdapat asumsi bahwa untuk memperbaiki posisi perempuan, beberapa intervensi pemerintah, tanpa disertai upaya untuk meningkatkan kekuasaan perempuan dalam melakukan negosiasi, tawar menawar dan untuk mengubah diri sendiri situasinya, tidak akan berhasil. Pendekatan ini berpusat pada upaya penghapusan subordinasi perempuan. Ini berarti kesamaan hak ekonomi (peluang untuk menguasai sumber daya produktif, persamaan upah untuk kerja yang sama, perlindungan ketenagakerjaan) hak-hak resmi tidak diskriminatif (mengenai perceraian, perkawinan, warisan, hak atas anak serta hak milik) serta hak-hak reproduktif dimasukkan dalam agenda. Dengan perhatian serius terhadap pemberdayaan perempuan, dalam konteks penelitian ini, adalah para wanita yang bergerak di bidang sektor informal dan UKM, diharapkan akan dapat:

1) Meningkatkan kemampuan wanita dalam manajemen usaha dan teknologi tepat guna untuk memfasilitasi wanita mengembangkan usaha.
2) Meningkatkan akses wanita terhadap sumber daya, modal,

pasar dan teknologi.

3) Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian wanita terhadap kesehatan keluarga dan sanitasi lingkungan.
4) Meningkatkan peranan wanita sebagai salah satu pengambil keputusan dalam berusaha.
5) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian kelembagaan wanita dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam di kawasannya.

Hasil Penelitian

Pertama, strategi CSR Bank Indonesia (BI) melalui program Desa Kita di desa Manding, Bantul bersifat interaktif yakni strategi yang menegaskan tentang kecenderungan perusahaan yang senantiasa melakukan antisipasi dan mengkaitkan tujuan perusahaan dengan kepentingan publik. Penerapan tanggung jawab sosialnya juga bukan merupakan strategi adaptif artinya baru merespon atau melakukan tanggung jawab sosialnya jika suatu peristiwa sudah terjadi atau mendapat tekanan dari masyarakat. Strategi yang ditetapkan BI ini juga bukan strategi pro aktif, yang artinya CSR dilakukan jika jika pimpinan perusahaan melakukan langkah terhadap perubahan lingkungan dengan upaya mendekati "penguasa" sebagai pihak yang dianggap mempunyai kekuasaan dalam menciptakan suatu kondisi lingkungan tertentu melalui peraturan yang dibuat untuk menjaga kepentingan perusahaan/instansi semata.

Strategi interaktif ini direalisasikan dengan:

Pertama, Pemilihan lokasi sasaran korban gempa yang dibantu BI melalui program Desa Kita dikaitkan dengan kebutuhan desa tersebut. *Assesment* yang diperoleh BI berdasarkan data-data baik dari Satkorlak, Disperindag Bantul ditopang riset pihak BI sendiri. Bantuan yang sifatnya sesaat, seperti bahan makanan, perumahan dan obat-obatan tidak lagi menjadi prioritas karena telah banyak pihak memberikannya kepada masyarakat korban gempa. Sifat bantuan yang diberikan BI lebih kepada upaya memandirikan usaha UKM yang terpuruk akibat gempa dan kebutuhan penunjang usaha, fasilitas dan promosi usaha. Menurut peneliti, langkah strategis ini jauh lebih menguntungkan dan dibutuhkan masyarakat, bahkan jauh hari sebelum gempa terjadi, kebutuhan penunjang tersebut menjadi harapan masyarakat. Selain itu, dipilihnya desa Sabdodadi dalam program Desa Kita, telah melalui beberapa kajian.

Desa ini telah menjadi perhatian BI sebagai wilayah sentra industri yang patut untuk dipromosikan di berbagai event pameran dagang dan pariwisata jauh sebelum terjadi gempa. BI acapkali membantu promo Manding melalui berbagai pameran dan memesan produk Manding untuk kebutuhan internal dalam upaya lebih mengenalkan produk Manding kepada

publik. Hal ini menunjukkan bahwa strategi interaktif dari program CSR BI telah dilakukan jauh hari sebelum terjadinya gempa. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi UKM Manding ini telah lama disoroti oleh pihak BI. Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan acara BI maupun pameran pameran industri dan perdagangan yang ada, pihak BI mengirimkan pengrajin-pengrajin UKM Kulit Manding ini untuk turut berpartisipasi. Ajang pameran rata-rata hanya diikuti oleh pengusaha-pengusaha besar mengingat beaya yang besar. Kesulitan ini telah diatasi oleh paguyuban pengrajin setempat dengan cara mengikutsertakan pengrajin dan pengusaha UKM Kulit Manding secara berkelompok bergantian untuk mengikuti pameran-pameran di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan dari sisi perbaikan menejerial, bekerjasama dengan Disperindagkop, BI mengadakan pelatihan ekspor bagi UKM Manding. Sederet manfaat telah dirasakan para pengrajin:

> " Cara-cara bertransaksi dengan importir telah kami kenal lewat pelatihan-pelatihan. Dan ini sangat berguna, bila pada saatnya nanti modal kami kuat, transaksi dengan importir itu bisa kita lakukan. Selama ini kami menjadi sub kontrak saja dari perusahaan-perusahaan besar. Resiko takut tidak dibayar *buyer* itulah yang jadi alasan utamanya. Kalau dengan cara menerima sub kontrak kita kan ndak repot, tinggal berproduksi sesuai order dan pembayarannya jelas" (Wawancara dengan *key informan* kode 6, Juli 2008)
>
> "Dos sepatu, *packaging* produk telah banyak yang diperbarui sesuai dengan trend sekarang. Ongkos produksi memang jadi naik, tapi kami perhitungkan sehingga kami masih untung. Karena kalau kemasannya menarik, pembeli lebih mantap dan senang" (Wawancara dengan *key informan* kode 8, Juli 2008)

Kedua, program yang diterapkan di desa Manding berangkat dari penjaringan aspirasi dan pertemuan warga maupun dengan tim teknis berulang kali untuk merumuskan program-program yang direncanakan ke depan. Sebelum program dilakukan, sejumlah tokoh masyarakat diajak rapat, dibuat beberapa kelompok: kelompok pemuda/karang taruna, ibu PKK, pengrajin dan umum. Dalam rapat-rapat tim teknis, pihak BI juga datang dengan harapan mampu menyusun program yang betul-betul dibutuhkan warga. Dengan demikian, upaya pemberdayaan perempuan melalui CSR BI diawali dengan menempatkan tokoh-tokoh penggerak perempuan untuk duduk bersama dengan elemen masyarakat lainnya guna merumuskan kebutuhan paska gempa bumi.

Pihak BI bersama tim teknis telah melakukan *community net analysis yakni* analisa komprehensif

terhadap perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan stratifikasi itu selanjutnya berusaha menemukan kebutuhan dan keinginan masing-masing kelompok Pemahaman terhadap perbedaan yang muncul ini penting sebab akan mendasari langkah berikutnya terutama dalam pengembangan dan upaya melibatkan mereka dalam pengembangan masyarakat. Upaya ini dilakukan guna meminimalisir konflik sehingga mampu meminimkan beaya sosial yang terlalu besar bagi pengembangan program-program selanjutnya.

Berdasarkan tabel 1 dan 2, nampak seluruh program yang dicanangkan BI terlaksana. Dari sembilan program fisik dan lima program non fisik, hanya dua program yang terlambat pelaksanaannya yakni pelatihan komputer dan bahasa. Meski di awal telah dilakukan penjaringan data, akan tetapi tidak mudah mengerahkan pelaku usaha kecil untuk meninggalkan usahanya dalam kurun waktu yang cukup lama untuk mengikuti pelatihan. Dari sembilan program fisik, hanya dua program atau 22,2% yang pendanaannya melibatkan warga desa Sabdodadi Manding, Bantul.

Ketiga, strategi interaktif terlihat dari jalinan komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan CSR. Komunikasi yang diterapkan adalah jenis komunikasi berjenjang bukan komunikasi langsung. Proyek ini diawali dengan penandatangan MOU antara Bupati Bantul dengan Pemimpin BI Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2006. Dengan demikian, pelibatan pemerintah lewat dinas-dinas terkait dan swasta cukup baik untuk mendukung kemajuan pengembangan industri sentra kulit Manding. Pelibatan dinas-dinas terkait, selanjutnya tertuang dalam struktur organisasi pelaksana, yang dikenal dengan tim teknis. Tim teknis inilah yang menjembatani kepentingan komunikasi pihak BI dengan masyarakat Manding. Dengan komunikasi berjenjang, cukup menguntungkan bagi institusi seperti BI yang notabene belum mengenal dengan baik kondisi masyarakat sasasan. BI dapat menggunakan corong-corong pemuka dan tokoh masyarakat serta tim teknis untuk menjembatani komunikasi termasuk bila muncul permasalahan di lapangan.

Serangkaian program yang dilakukan BI tersebut bukan tanpa hambatan yang berarti. Masalah sosialisasi telah dan terus dilakukan dalam arti memberikan pemahaman program CSR BI ke segenap lapisan masyarakat Manding dengan harapan mereka dapat memberikan emahaman, empati dan dukungan pada CSR BI. Bahkan corong-corong yang diajak berbicara tidak hanya tokoh masyarakat, paguyuban, pemuka agama, dan tokoh yang dipandang berseberangan dengan paguyuban pun diajak berdialog. Merekalah penghimpun, penjaring aspirasi dan

Tabel 1. Jenis Pembangunan Fisik CSR BI di Manding

No.	Pembangunan Fisik	Asal Pendanaan	Terlaksana/Tidak	Keterangan
1.	Pembangunan Gapura	BI dan warga Manding	Terlaksana	-
2.	Tempat Parkir	BI	Terlaksana	-
3.	Gedung Unit Kesehatan Kerja	BI	Terlaksana	-
4.	Penyempurnaan Balai Dusun	BI dan warga Manding	Terlaksana	-
5.	Pemasangan 65 bak sampah	BI	Terlaksana	-
6.	Pemasangan 4 baliho dan 11 petunjuk arah	BI	Terlaksana	-
7.	Pemasangan gorong-gorong 136 m	BI	Terlaksana	-
8.	Pembangunan 2 unit ATM	BI dan Bank Swasta	Terlaksana	-
9.	Pembangunan 2 MCK			

Sumber : BI, 2008, data diolah

Tabel 2. Jenis Pembangunan Non Fisik CSR BI di Manding

No.	Pembangunan Non Fisik	Asal Pendanaan	Terlaksana/Tidak Terlaksana	Keterangan
1.	Mengikutsertakan para perajin pada pameran-pameran	BI	Terlaksana	Insidental
2.	Pelatihan tata cara ekspor	BI	Terlaksana	-
3.	Pelatihan desain alas kaki (sandal sepatu) dan jaket	BI	Terlaksana	-
4.	Pelatihan Bahasa Inggris	BI	Terlaksana	Implemensasi Program terlambat
5.	Pelatihan Komputer	BI	Terlaksana	Implementasi Program terlambat

Sumber : BI, 2008, data diolah

penyaring bilamana ada permasalahan dengan masyarakat. Para pemrakarsa yang terlibat dalam CSR BI sering mendapat sorotan dari masyarakat seolah-olah mereka mendapatkan keuntungan berlimpah dari BI sehingga memicu konflik. Untuk itu, BI berulang kali mengadakan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan pembicaraan dengan pihak terkait. Masalah yang timbul dalam penggalangan modal sosial, rata-rata BI tidak mengalami kesulitan karena bekerja sama dengan instansi terkait.

Manfaat dari fasilitas yang dibangun BI seperti ATM dan taman parkir pada gilirannya amat menunjang perekonomian masyarakat sekitar Manding. Taman parkir yang semula sarat dengan konflik kepentingan bagi pengelola parkir lainnya dapat terselesaikan dengan musyawarah warga setempat. Bahkan dari pengelolaan parkir tersebut dapat

menyetor ke kas kampung sebesar 185 hingga 200 ribu perbulan. Artinya, selain pengunjung dimudahkan dengan fasilitas parkir dan kenyamanan berbelanja, warga diuntungkan dengan pemasukan parkir (Wawancara dengan *key informan* kode 11, Juli 2008).

Keempat, komitmen BI untuk berperilaku etis dan berkonstribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di desa Manding nampak jelas, program fisik dan non fisik diupayakan dapat meningkatkan hidup warga dan pengrajin Manding, komunitas lokal dan masyarakat luas. Pemberian program bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan tidak hanya bersifat insidental namun diharapkan berkesinambungan. Di sinilah CSR BI dapat dipandang sebagai pengejawantahan *corporate ethics* terhadap lingkungan bisnis terutama aspek masyarakat sekitarnya.

Lepas dari rangkaian tahapan yang cukup panjang itu, yang lebih penting adalah profesionalisme tenaga SDM yang profesional dalam melakukan analisis sosial, analisis lingkungan dan sebagainya serta pemahaman *community development*. Menurut pendapat AB Susanto (2003), tenaga *community development* yang akan memadukan antara analisa sosial, lingkungan serta resep program yang ditawarkan. Kesalahan dalam mendiagnosa atau menawarkan program yang kompatibel dengan kebutuhan bisa berakibat fatal. Profesionalisme juga membutuhkan komitmen yang kuat dan fanatik para pengembangannya. Dalam program DESA KITA ini, BI telah berupaya semaksimal mungkin yang nampak pada pemilihan mitra kerja seperti perbankan swasta untuk pengadaan ATM dan PT Inixindo serta Cilac UII yang berperan sebagai mitra kerja untuk kursus bahasa Inggris bagi pengrajin Manding. Dalam prakteknya di lapangan, pihak BI juga memperoleh input-input menarik bagi pengembangan CSR ke depan, seperti ide pembuatan perpustakaan. Hingga akhir penelitian ini dilaporkan, pihak BI tengah bernegosiasi tentang penyediaan lahan dan tempat serta pengelola dengan warga Manding. Pada prinsipnya BI cukup *concern* pada pengembangan perpustakaan dan siap untuk memberikan dukungan dana dan buku-buku yang dibutuhkan. Agar tercapai utilisasi yang tinggi maka berbagai kemungkinan versi pengelolaan perpustakaan pun turut menjadi bahan pertimbangan.

Terkait dengan konsep pengembangan CSR, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah sosialisasi yang berulang agar lebih meningkatkan kebanggaan warga, reevaluasi atau melakukan audit proyek pembangunan guna menyusun perbaikan dan *strategic planning* berkaitan dengan masalah lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, masyarakat sekitar hingga peningkatan servis yang hendak dilakukan. Mengingat program belum berlangsung hingga dua tahun dan memungkinkan dievaluasi, selain itu, pengamatan peneliti dalam hal ini

hanya sebatas implementasi CSR BI maka perihal evaluasi tidak menjadi perhatian peneliti. Akan tetapi, selama berlangsungnya program CSR BI, evaluasi di tengah-tengah program berlangsung telah dilakukan BI dan tim teknis untuk mengukur efektifitas program tersebut berlangsung sesuai dengan perencanaannya atau tidak.

Persoalan manajemen usaha dan penguasaan teknologi tepat guna masih menjadi persoalan yang dihadapi sebagian besar pengrajin di desa Manding. Pada umumnya, mereka belum menggunakan pembukuan keuangan untuk menunjang manajemen usahanya. Keuangan rumah tangga dan keuangan perusahaan sering dicampur sehingga menyulitkan untuk *forecasting* usaha. Bagi pengrajin wanita yang rata-rata menekuni usaha kerajinan sebagai sambilan, tingkat produktifitasnya lebih rendah bila dibandingkan dengan pengrajin yang memang hampir 7-8 jam berada di industri kulit. Sedangkan bagi penjaga *show room*, fungsi utamanya adalah hanya melayani pembeli. Persoalan manajemen keuangan dan penerapan teknologi tepat guna ini telah diantisipasi oleh Dinas Perindagkop Bantul dengan pengadaan training-training sesuai kebutuhan. Namun jumlah pengrajin kulit yang banyak tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan training dan ketersediaan alat. Untuk itulah, masalah pengelolaan manajemen keuangan dan teknologi tepat guna ini tak mudah dipecahkan.

Belum lagi bila ditinjau dari pemakaian teknologi modern yang menjamin efisiensi dan produktifitas, penguasaan teknologi terbaru dalam desain sepatu dan kulit masih jauh. Pada gilirannya, produk Manding harus berjuang keras dengan desain-desain baru yang merupakan hasil garapan dari pengrajin Bandung atau Tanggulangin. Hasil survey peneliti, lebih dari 40 persen produk sepatu di Manding berasal dari luar desa Manding seperti Bandung dan Tanggulangin. Dengan pemilihan desain yang lebih baik nantinya bukan hanya masyarakat kelas bawah dan menengah saja, tetapi masyakat kelas atas akan memborong produknya. Apalagi, peningkatan kualitas produk ini sejalan dengan promosi desa Manding sebagai desa wisata sentra kerajinan kulit di Bantul. Artinya, masyarakat yang berkunjung tidak hanya sekedar berbelanja tetapi dapat menikmati suasana dan keindahan alam sekitar.

Kelima, program penguatan kelembagaan merupakan suatu indikator keberhasilan program recovery gempa sebagai bagian program CSR BI. Penguatan lembaga yang dimaksud tak lain adalah pelibatan tim PKK dalam memfungsikan pembangunan Unit Kesehatan Kerja di desa Manding. Tim PKK juga dilibatkan dalam penseleksian putra/putri warga untuk mendapatkan bantuan beasiswa BI. Serangkaian program tidak lagi bersifat

top down melainkan berdasarkan penjaringan aspirasi ibu-ibu PKK setempat termasuk dalam pengelolaannya.

> "Program CSR BI melalui Desa Kita di Manding ini memang tidak mengkhususkan untuk pemberdayaan wanita. Akan tetapi mulai dari proses *assessment* hingga implementasi program, peran kaum wanitanya amat kami perhatikan. Apalagi sebagian besar pengrajin adalah wanita, dampak program ini diharapkan nantinya memandirikan kaum wanita dan komunitas Manding secara luas ."(Wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Sektor Riil Bank Indonesia cabang Yogyakarta, Usep Sukarya, Agustus, 2008).

> "PKK di sini cukup padat aktifitasnya ya, jadi mereka juga kita ajak *rembugan* mulai dari perumusan program, peresmian acara, sampai nantinya bila program pengelolaan perpustakaan masjid jadi, kami akan melibatkan kekuatan PKK" (Wawancara dengan Bp. Atmaji, Tim Teknis CSR BI, Agustus 2008).

Situasi kondisi paska gempa, di lain sisi memacu kreatifitas perempuan Manding untuk lebih mencari inovasi baru dalam berkarya. Produk dusun Manding tak hanya sepatu, tas dan jaket, sisa kulit mulai diproduksi menjadi aneka souvenir yang memiliki nilai jual. Beberapa pengusaha wanita telah menerima order dari luar negeri. Ini artinya, semakin banyak sumber daya perempuan yang terserap. Dalam hal penataan lingkungan desa Wisata Manding pun, pelibatan PKK tidak dapat diabaikan. Melalui pertemuan PKK, warga dihimbau tentang pentingnya penataan lingkungan yang asri, bersih dan nyaman sehingga wisatawan yang datang merasa puas dan betah. Pada forum tersebut, perkembangan usaha kerajinan sedikit banyak ditopang dari unit usaha simpan pinjam PKK. Di samping itu, anggota juga memperoleh informasi-informasi terbaru di bidang kewirausahaan. (Wawancara dengan *key informan* kode 10, Juli 2008).

Akan tetapi, masalah penataan lingkungan bukanlah hal yang sederhana, meski telah ada 65 bak sampah yang dibangun dari program CSR BI, masih saja pengelolaannya dikeluhkan masyarakat. Dalam suatu kesempatan hal tersebut pernah dirapatkan dengan warga, tapi sesudah itu, masih banyak warga yang belum menggunakan bak sampah dengan baik atau sampah tidak terangkut sehingga menimbulkan bau. Inilah tantangan dari pengurus paguyuban dan masyarakat setempat untuk bisa meningkatkan rasa handarbeni terhadap fasilitas yang telah diberikan BI melalui program CSR. Kurangnya rasa handarbeni ini bisa jadi karena mereka tidak dilibatkan dalam pembangunan program fisik tersebut (Wawancara dengan Bp. Atmaji, Agustus 2008).

Dengan demikian, sebagian besar program CSR BI cukup dirasakan manfaatnya bagi warga bahkan dalam pemberdayaan perempuan. Namun mengingat hampir seluruh pendanaan program ditanggung BI dan tidak bersifat swakelola, berdampak pada kurangnya rasa *handarbeni* warga Manding terhadap pembangunan fisik yang telah dilaksanakan.

Penutup

Program CSR BI Desa Kita yang meliputi pembangunan fisik dan non-fisik yang nyata-nyata dibutuhkan oleh masyarakat untuk menciptakan desa yang mandiri, siap menerima kunjungan wisatawan domestik mapun manca negara. Strategi interaktif yang dipilihnya mampu melibatkan peran perempuan baik bidang perencanaan program hingga pelaksanaannya. Perempuan desa Manding pun diberikan kesempatan berkiprah lebih banyak dalam penguatan lembaga dan program bea siswa hingga pengelolaan perpustakaan. Program CSR BI sedikit banyak telah membantu meningkatkan kemampuan wanita dalam manajemen usaha dan teknologi tepat guna untuk memfasilitasi wanita mengembangkan usaha; peningkatan akses wanita terhadap sumber daya, modal, pasar dan teknologi; peningkatan pengetahuan dan kepedulian wanita terhadap kesehatan keluarga dan sanitasi lingkungan; peningkatan kualitas peningkatan kualitas peran dan kemandirian kelembagaan wanita dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam di kawasannya.

Namun mengingat hampir seluruh pendanaan program ditanggung BI dan tidak bersifat swakelola, rasa *handarbeni* warga Manding kurang terhadap pembangunan fisik yang telah dilaksanakan.Melihat kemanfaatannya maka ada beberapa hal yang patut direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas program pemberdayaan perempuan di desa tersebut:

1. Peningkatan kemampuan wanita dalam pengelolaan keuangan dan penerapan tekonologi tepat guna dapat dilakukan dengan pendampingan intensif meliputi bantuan teknis usaha dan administrasi terhadap pengelolaan keuangan. Pendampingan hendaknya sampai pada upaya membantu kelompok pengrajin UKM tersebut memperoleh akses permodalan lain dari perbankan.
2. Melalui forum-forum yang diprakarsai desa, sudah saatnya masyarakat desa dan pemerintah desa lebih meningkatkan partisipasi warga dalam penataan lingkungan yang asri, sejuk dan nyaman dengan memanfaatkan fasilitas program CSR BI dapat berujud pengelolaan sampah organik ataupun forum sadar wisata.
3. Meskipun koordinasi instansi dan tim teknis cukup baik dalam

mewujudkan program Desa Kita di desa Manding, pihak BI perlu memikirkan pengelolaan swakelola oleh warga, khususnya dalam proyek program fisik sehingga dengan cara ini, rasa handarbeni warga lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Davis, Keith Frederick, Wiliam, 1980, *Business and Society: Management, Public Policy, Ethics*, Fifth Edition, Mc. Graw hill International Book Company.

Firdaus, M., 2005, "Mengembangkan Lembaga Kredit Mikro yang Sensitif Gender", *Jurnal USAHAWAN* no. 1 Th. XXXIV Januari 2005.

Firdaus, M. dkk, 2001, "Aspek Pemberdayaan Perempuan di Balik Lembaga Kredit Mikro", *Jurnal ANALISIS SOSIAL*, vol. 6 no.3 Desember 2001.

Firdaus, M. dan Ratih Damayanti, 2004, "Situasi Tanpa Perlawanan (Penelusuran Kondisi Perempuan Usaha Mikro di Jawa Tengah)", *Jurnal Perempuan, no. 35.*

Grootaert, C., D . Narayan, VN Jones & M. Woolcock, 2003, *Integrated Questionaire for the Measurement of Social Capital (SC-IQ)*, World Bank, Washington, DC.

Hayness, Jeff, 2000, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru KaumTerpinggir (terj.)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Ismawan Bambang., 2003, "Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otda", *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Artikel II no 2 April 2003.

Krisnamurthi, Bayu, 2003, "Pemberdayaan Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel II no. 2 April 2003.*

Prijono, Onny. S, Pranarka (ed), 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.

Krishna, A, 2002, *Active Social Capital: Tracing the Roots of Development and Democracy*, Columbia University Press, New York.

Narayan, D, 1999, Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty, Policy Research *Working Paper 2167*, Poverty Division, Poverty Reduction and Economic Management Network, World Bank, Washington, DC.

Putnam, RD, 1993, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton University Press, New Jersey.

Sutopo, HB, 1988, *Penelitian Kualitatif, Dasar, Teoritis, Praktis*, UNS Press, Surakarta.

Susanto, AB, Mengembangkan *Corporate Social Responsibility dalam Jurnal Reformasi Ekonomi* Vol. 4, No. 1, Januari-Desember 2003 (p. 9-11).

Woolcock, M. 1998, *Social Capital and Economic Development: Towards a Theoritical Synthesis and Policy Framework*, Theory and Society 27 (2).

Warta Pertamina (online), *Bisnis Zaman Sekarang Tak Mungkin Tanpa CSR*, humpas/news/Wpertamina/2004/Juli_2004/wp070403 htm-18k, diakses 2 Mei 2007.

Zuhroh, Siti, Upaya Mengembangkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Pendekatan Etis dalam *Jurnal Eksekutif*, Vol.3, nomer 2 Agustus 2006.